

DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASARAKAT DESA POHGADING KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI TAHUN 2007-2014

Oleh :

Faza Fauzana

SINOPSIS

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu hidup di tengah-tengah masyarakat, padahal sejak sebelum kemerdekaan bahkan sampai sekarang pemerintah selalu menjadikan kemiskinan sebagai perhatian utama. Salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengimplementasikan PNPM Mandiri Pedesaan. Berjalan selama kurang lebih delapan tahun, implementasi PNPM Mandiri Pedesaan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan, tentu perlu dikaji, seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang diukur adalah dampak pada kehidupan ekonomi, dampak pada pembuatan keputusan, dampak pada sikap publik, dan dampak pada kualitas kehidupan. Kesejahteraan diukur dengan berbagai indikator, yaitu peningkatan usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan akses terhadap sumber produktif, dan peningkatan partisipasi publik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan *design before after*. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, dokumentasi dan kuisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PNPM M-Pd memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada setiap indikator kesejahteraan terdapat perubahan positif dari keadaan sebelum (*before*) dan sesudah (*after*) implementasi PNPM M-Pd. Dampak terhadap kehidupan ekonomi ditandai dengan kondisi usaha masyarakat dari biasa saja menjadi meningkat rata-rata 41.8%. Sikap publik masyarakat juga berubah dari memandang negatif dan apatis menjadi positif terhadap pemerintah dan kebijakannya. Dalam pengambilan keputusan pun terjadi perubahan dari tidak melibatkan masyarakat menjadi melibatkan masyarakat, dengan kata lain partisipasi publik meningkat. Dampak terhadap kualitas kehidupan ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

Meskipun membawa berbagai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, PNPM M-Pd juga tidak luput dari kekurangan, yaitu jenis usaha pada kegiatan SPP yang dilakukan secara individu bukan secara kolektif. Sehingga dampak dari berkembangnya sebuah usaha tidak dirasakan secara merata melainkan masing-masing individu. Penulis merekomendasikan agar dibentuk satu kelompok secara kolektif agar manfaat dari berkembangnya usaha dapat dirasakan secara merata oleh semua anggota.

Kata kunci : dampak, PNPM M-Pd, kesejahteraan masyarakat, Desa Pohgading

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang telah lama dialami Bangsa Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah merdeka, kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah. Meskipun upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan sejak masa awal kemerdekaan bahkan sampai sekarang, namun tetap saja kemiskinan masih hidup ditengah-tengah masyarakat. Dari tahun ke tahun, persentase penduduk miskin Indonesia selalu mengalami fluktuasi, meskipun cenderung turun secara lambat. Jika melihat catatan Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan, sejak tahun 1970 hingga 2013¹ jumlah penduduk miskin di pedesaan selalu lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin perkotaan.

Memasuki masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2007 disahkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan menyeluruh. Secara umum, tujuan dari pelaksanaan PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. PNPM Mandiri lebih memfokuskan kegiatannya pada pemberdayaan masyarakat dibanding dengan hanya sebatas memberikan bantuan langsung. Sehingga nantinya diharapkan akan tercipta kemandirian masyarakat yang berdaya dalam mengangkat dirinya sendiri dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, PNPM juga mengutamakan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan langsung masyarakat sebagai pelaku utama (*bottom up*), juga mengusung prinsip kesetaraan dan keadilan gender serta mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat miskin.

¹ Lihat <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>

Salah satu program yang tergabung dalam PNPM Mandiri adalah PNPM Mandiri Pedesaan atau yang biasa disingkat PNPM MPd. Terhitung sejak dijalankan tahun 2007 dan selesai pada tahun 2014, PNPM Mandiri khususnya PNPM MPd sudah berjalan selama delapan tahun. Dengan waktu yang cukup lama dan alokasi dana yang cukup besar yaitu maksimal Rp. 3 Milyar per kecamatan², pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan perlu dikaji tingkat keberhasilannya dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Desa Pohgading merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran pelaksanaan PNPM MPd di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Jawa Tengah. Pada tahun 2007, tercatat sebanyak 580 rumah tangga miskin (RTM) di desa ini dengan rincian 74 RTM sangat miskin, 297 RTM miskin, dan 209 RTM hampir miskin. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.061 jiwa yang mayoritas

mata pencahariannya adalah buruh tani dan pendidikan terakhir adalah tingkat Sekolah Dasar serta kondisi infrastruktur yang buruk³, maka pelaksanaan PNPM MPd di desa ini perlu untuk dikaji, untuk mengetahui seberapa besar dampak PNPM MPd dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Rumusan Masalah

- a. Apa saja hasil PNPM M-Pd di Desa Pohgading ?
- b. Bagaimana dampak PNPM M-Pd terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pohgading ?

2. Kerangka Teori

a. Dampak

Dampak merupakan akibat lebih jauh dari pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan⁴. Ada empat tipe

²Bappenas, *Evaluasi PNPM Mandiri*. 2013 hlm. 78

³ <http://pohgadingpati.blogspot.co.id/> diakses pada 3 oktober 2015: 21.08 WIB

⁴ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2005, hlm. 122

dampak yang dapat diuji menurut Islamy dan Ripley⁵ yaitu : pertama, dampak pada kehidupan ekonomi yang diukur melalui indikator yang bersifat ekonomis, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah peningkatan usaha, peningkatan pendapatan, dan peningkatan akses terhadap sumber produktif.

Kedua, dampak pada pengambilan keputusan, dalam penelitian ini digunakan indikator peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Ketiga, dampak pada sikap public, baik terhadap pemerintahnya maupun terhadap implementasi PNPM M-Pd sendiri. Terakhir, dampak pada kualitas kehidupan yang diukur dengan indikator yang bersifat non ekonomis seperti kemampuan dalam

memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

b. Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sedangkan pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang sehingga mereka memiliki kekuatan untuk : memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan ; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan

⁵ Dalam Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media, 2010 , hlm. 133

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka⁶.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui, menjelaskan dan memberikan gambaran tentang dampak pelaksanaan PNPM MPd terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banister dkk (1994)⁷ mengemukakan bahwa inti dari penelitian kualitatif yaitu suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari

suatu fenomena yang diteliti. Dampak yang diukur adalah tipe dampak yang disebutkan oleh Islamy dan Ripley yaitu dampak pada kehidupan ekonomi, dampak pada sikap public, dampak pada pengambilan keputusan, dan dampak pada kualitas kehidupan. Sedangkan kesejahteraan diukur dari beberapa indikator antara lain peningkatan usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan akses terhadap sumber produktif, dan peningkatan partisipasi public.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *Single Program Before-After*. Dalam rancangan ini dilakukan pengukuran kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program dan digunakan satu kelompok subyek dan tidak membedakan antara *control group* dengan *eksperimental group*. Pertama-tama dilakukan pengukuran terhadap kondisi awal kelompok tersebut, lalu dikenakan perlakuan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu dilakukan pengukuran kembali untuk kedua kalinya setelah dikenakan

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm 58

⁷ Banister dkk (1994) dalam Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012, hlm. 8

perlakuan. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan kondisi sebelum dan sesudah tindakan/perlakuan untuk menentukan seberapa perbedaannya yang timbul. Untuk menjamin bahwa perubahan yang terjadi pada setiap indikator dampak adalah akibat dari pelaksanaan PNPM dan bukan dari pengaruh program lain, maka pada penelitian ini dilakukan dengan mengontrol indikator yang hanya terdapat pada PNPM M-Pd.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil PNPM M-Pd di Desa

Pohgading

1.1 Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Simpan pinjam perempuan adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam. Di Pohgading terdapat sebelas kelompok SPP yang aktif melakukan kegiatan simpan

pinjam perempuan. Di desa ini kegiatan simpan pinjam berjalan lancar tanpa ada kemacetan karena jika ada anggota yang telat membayar akan dibayarkan oleh ketua kelompok mereka dahulu kemudian pada periode berikutnya tidak akan diberikan pinjaman lagi sehingga tidak mengganggu proses perguliran.

1.2 Kegiatan Fisik

Kegiatan fisik di Desa Pohgading berupa pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur. Kegiatan fisik ini dilakukan sejak tahun 2007 hingga tahun 2014.

2. Dampak PNPM M-Pd Desa Pohgading

2.1 Dampak Pada Kehidupan Ekonomi

a. Peningkatan Usaha

Salah satu tujuan PNPM M-Pd yaitu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Salah satu aspek yang dapat dijadikan indikator dari menurunnya tingkat kemiskinan adalah meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat. PNPM Mandiri Pedesaan, diakui oleh penerima manfaat sangat memberikan hasil yang positif bagi kehidupan ekonomi. Seluruh responden menyatakan bahwa PNPM M-Pd memang memberi hasil yang positif bagi mereka :

Hasil yang positif tersebut ditandai dengan perubahan kondisi usaha mereka dari biasa-biasa saja menjadi meningkat. Sebelum implementasi PNPM M-Pd, dari 44

responden sebanyak 36 orang menyatakan setuju dan 4 orang sangat setuju bahwa bahwa kondisi usaha mereka sedang-sedang saja dan sulit berkembang karena tidak tersedianya dana untuk pengembangan, sehingga mereka menggunakan sumber daya finansial seadanya. Hanya 3 orang responden yang menyatakan ragu-ragu dan 1 orang tidak setuju. Pasca PNPM M-Pd dilaksanakan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mendapatkan sumber produktif berupa dana atau tambahan modal sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik. Sebanyak 34 responden menyatakan bahwa mereka setuju bahwa usaha mereka meningkat setelah PNPM M-Pd dilaksanakan dan sebanyak 10 responden menyatakan sangat setuju. Dengan kata lain 100 % responden

manyatakan bahwa usaha mereka meningkat. Dengan tidak adanya responden yang menyatakan tidak setuju bahwa kondisi usaha mereka meningkat, membuktikan bahwa implementasi PNPM M-Pd memberi dampak yang signifikan terhadap berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Peningkatan Pendapatan

Sejalan dengan berkembangnya kondisi usaha, pendapatan masyarakat penerima manfaat pun meningkat setelah implementasi PNPM M-Pd, dimana sebelum ada PNPM M-Pd pendapatan mereka rendah. Sebanyak 30 responden setuju bahwa pendapatan mereka rendah sebelum PNPM M-Pd dilaksanakan, 1 responden sangat setuju, 8 ragu-ragu, dan 5 tidak setuju.

Setelah pelaksanaan PNPM M-Pd, pendapatan masyarakat penerima manfaat mengalami peningkatan. Meskipun tidak dapat menggambarkan dengan pasti seberapa besar jumlah peningkatannya dikarenakan jenis usaha yang dilakukan adalah industri rumahan dan berdagang, namun responden menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat setelah implementasi PNPM M-Pd sebagai berikut :

Kemudian melalui kuisioner sebanyak 33 responden menyatakan setuju, 8 sangat setuju, 3 ragu-ragu, dan 0 tidak setuju. Secara keseluruhan PNPM M-Pd memang dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka, ditandai dengan dominannya masyarakat yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Selain berpengaruh

pada peningkatan pendapatan kelompok penerima manfaat, implementasi PNPM M-Pd juga mempengaruhi pendapatan Desa Pohgading . Pendapatan yang dimiliki Pemerintah Desa Pohgading berasal dari transfer (dari Provinsi dan Kabupaten) jumlahnya kurang mencukupi seluruh pengeluaran /belanja desa sehingga pendapatan desa lebih di dominasi dari PADesa. Berhubung Desa Pohgading belum memiliki BUMDes dan aset yang dimiliki juga tidak banyak maka pendapatan lebih banyak berasal dari swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat, yaitu membangun kekuatan sendiri dengan melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Narasumber menyatakan bahwa sebelum PNPM Mandiri

pendapatan desa Pohgading minim dikarenakan pendapatan warga masyarakatnya juga masih rendah. Secara tidak langsung ekonomi desa meningkat karena perbaikan infrastruktur yang melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga dalam melakukan swadaya sesudah PNPM Mandiri ada kenaikan dikarenakan pendapatan warga masyarakatnya juga sudah meningkat hal dan berpengaruh pada pendapatan desa Pohgading tersebut merupakan keberhasilan program PNPM Mandiri⁸.

c. Peningkatan Akses Terhadap Sumber Produktif

Salah satu motor penggerak perokonomian adalah tersedianya sumber produktif yang dapat diakses oleh masyarakat. Sumber produktif

⁸ Wawancara dengan Bapak Parso ketua TPK Desa Pohgading & Kaur Pembangunan pada 26 November 2015 10.35 WIB di kediaman Bapak Parso

yang sangat memungkinkan untuk menggerakkan usaha masyarakat adalah berupa finansial atau yang biasa disebut modal. Salah satu lembaga yang menyediakan sumber produktif tersebut adalah instansi keuangan seperti bank atau koperasi. Namun, untuk bisa mendapatkan modal dari dua instansi tersebut harus memenuhi syarat yang cukup berat dan bunga yang cukup besar. Sehingga akhirnya masyarakat tidak bisa mengaksesnya karena terhalang persyaratan yang memberatkan.

Hal tersebut berdampak pada kondisi usaha masyarakat yang tidak bisa berkembang karena tidak dapat mengakses sumber-sumber produktif untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban hampir seluruh responden yaitu 39 setuju dan 2 sangat setuju bahwa mereka kesulitan

bahkan tidak bisa mengakses sumber-sumber produktif sebelum PNPM M-Pd dilaksanakan. Sisanya, sebanyak 2 menyatakan ragu-ragu dan 1 tidak setuju.

Pasca implementasi PNPM M-Pd responden menyatakan akses terhadap sumber produktif menjadi sangat mudah dan tidak memberatkan bagi mereka. Sehingga usaha pun dapat berkembang dengan adanya tambahan modal. Sebanyak 10 responden menyatakan sangat setuju dan 33 setuju bahwa mereka dapat dengan mudah mengakses sumber produktif. Hanya 1 yang menyatakan ragu-ragu dan 0 menyatakan tidak setuju.

2.2 Dampak Pada Sikap Publik

Kebijakan atau program akan mempengaruhi sikap orang dalam berbagai bentuk. Baik mereka yang memperoleh keuntungan maupun publik secara

keseluruhan, akan memiliki sikap terhadap program tertentu serta terhadap kinerja pemerintah. Demikian pula dengan PNPM M-Pd, program ini telah membawa perubahan pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desanya. Melalui wawancara, 4 responden mengatakan bahwa sebelum PNPM M-Pd dilaksanakan mereka tidak memiliki pandangan terhadap pemerintah, 4 responden menyatakan bahwa pemerintah tidak memperhatikan rakyat kecil, 2 responden menyatakan kinerja pemerintah sudah baik dan 1 responden menganggap pemerintah kurang maju dan lamban dalam bekerja.

Pendapat masyarakat tersebut dibenarkan oleh Pemerintah Desa Pohgading sebagaimana narasumber menyatakan bahwa sebelum implementasi PNPM M-Pd, APBDesa belum tersusun dengan baik, dalam artian kegiatan yang dibiayai melalui APBDes belum ada keberpihakan (alokasi)

kepada warga miskin/kurang mampu⁹. Hal itu dikarenakan pendapatan Desa Pohgading tidak mencukupi dan harus memprioritaskan bidang-bidang lain yang lebih mendesak. Kemudian sesudah PNPM M-Pd dilaksanakan, terjadi sinkronisasi antara APBDes dan dana PNPM M-Pd sehingga pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk kepada warga miskin /kurang mampu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PNPM M-Pd dapat membantu dan memberi dampak positif kepada pemerintah Desa Pohgading dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan alokasi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin/kurang mampu.

Adanya sinkronisasi antara APBDesa dengan dana PNPM M-Pd yang membantu pemerintah desa untuk mengalokasikan dana kepada masyarakat miskin membuat pandangan masyarakat pun mulai berubah

⁹ Wawancara dengan Bapak Parso ketua TPK Desa Pohgading & Kaur Pembangunan pada 26 November 2015 10.35 WIB di kediaman Bapak Parso.

dalam menilai pemerintah desa. Masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah dan menilai kinerja pemerintah lebih positif dan lebih baik. Merasa lebih diperhatikan dalam hal ini sudah ada kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat kurang mampu dengan diadakannya kegiatan SPP ini misalnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mulai berjalan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain sehingga masyarakat menilai pemerintah lebih positif.

Selain menunjukkan sikap positif terhadap kinerja pemerintah, seluruh responden juga menunjukkan sikap positif terhadap implementasi PNPM M-Pd. Seluruh responden sangat setuju dengan implementasi program ini dan berharap agar program ini jangan dihapuskan.

Dari respon positif yang ditunjukkan oleh responden tentang pandangannya terhadap pemerintah dan terhadap PNPM M-Pd dapat ditarik kesimpulan bahwa

implementasi PNPM M-Pd memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sikap-sikap publik kearah yang lebih baik.

2.3 Dampak Pada Pengambilan Keputusan

a. Peningkatan Partisipasi Publik

Sebagai bagian dari sistem politik masyarakat tentu memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan publik. Oleh karena itu PNPM M-Pd juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesempatan kerja masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Sebelum PNPM M-Pd diimplementasikan, sebagian besar

masyarakat penerima manfaat PNPM M-Pd tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dari seluruh responden, hanya sebanyak 7 yang menyatakan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sebelum PNPM M-Pd dilaksanakan, 1 ragu-ragu, dan sisanya sebanyak 34 menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi.

Pasca PNPM M-Pd dilaksanakan, sebanyak 42 responden menyatakan bahwa mereka ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sisanya, 1 menyatakan sangat setuju dan 1 ragu-ragu. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan dari tidak terlibat menjadi terlibat. Keterlibatan masyarakat pasca implementasi PNPM meningkat dikarenakan PNPM M-Pd membuka saluran partisipasi bagi masyarakat

dengan mengutamakan prinsip perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif yaitu masyarakat berperan aktif dalam tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan seperti yang tercantum dalam PTO Penjelasan I PNPM M-Pd.

2.4 Dampak Pada Kualitas Kehidupan

Kebijakan atau program juga memiliki dampak terhadap kualitas hidup individu, kelompok-kelompok individu, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran terhadap dampak jenis ini dapat bersifat non ekonomis seperti terpenuhinya aspek kesehatan dan kesempatan memperoleh pendidikan. Aspek kesehatan diukur dari mampu atau tidaknya masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan baik di instansi kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta. Sedangkan aspek pendidikan diukur dari mampu atau tidaknya masyarakat

memberikan pendidikan formal di sekolah bagi anak-anaknya. Sebelum PNPM M-Pd dilaksanakan, melalui wawancara terhadap 11 ketua kelompok 6 responden yang menyatakan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikannya. Sisanya sebanyak 5 responden menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk memenuhi kesehatan dan pendidikan.

Pasca PNPM M-Pd dilaksanakan hanya satu responden yang menyatakan tetap kesulitan memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, sisanya seluruhnya menyatakan bahwa mereka dapat memenuhinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM M-Pd membawa dampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, PNPM M-Pd juga mengalokasikan dana untuk bidang kesehatan berupa pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita di 5 Posyandu yang ada di Desa Pohgading, kegiatan PMT dilakukan setiap tahun oleh

TPK PNPM M-Pd Desa Pohgading. Pada bidang pendidikan dilakukan dengan memberikan makanan tambahan di PAUD yang ada di Desa Pohgading.

D. Kesimpulan

Melihat hasil positif yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kesejahteraan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi PNPM M-Pd memang memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Selain terhadap masyarakat, PNPM M-Pd juga memiliki dampak positif bagi kondisi Desa Pohgading kearah yang lebih baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa PNPM M-Pd menghasilkan dampak yang dikehendaki (*intended impact*) atas implementasinya, sesuai dengan tujuan umum PNPM M-Pd yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Meskipun membawa dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat dan kondisi desa, PNPM M-Pd juga tidak lepas dari kekurangan. Sebagai program pemberdayaan masyarakat, seharusnya kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti SPP bersifat terpadu. Selama ini, kondisi yang terjadi dilapangan adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok SPP memiliki usaha yang bersifat individu. Seharusnya usaha yang dilakukan adalah usaha bersama sehingga seluruh anggota kelompok dapat merasakan manfaatnya tanpa terkecuali jika usaha tersebut berkembang. Jika masih dilakukan sendiri-sendiri, maka akan terdapat kesenjangan antara yang individu berkembang dan yang tidak berkembang. Sehingga manfaat PNPM M-Pd tidak menyeluruh dirasakan oleh masyarakat secara merata.

a. **Saran**

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Sebagai pelaksana tingkat kecamatan dan tingkat desa, UPK dan TPK hendaknya tidak hanya mengawasi proses perguliran saja, tetapi juga menyentuh apakah dana yang dicairkan digunakan dalam koridornya atau tidak.

2. Pemerintah Desa

Memiliki fungsi pengawasan dalam hubungan kelembagaan PNPM M-Pd terhadap TPK dalam mendukung kegiatan, hendaknya pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa mengoptimalkan pengawasan serta pembimbingan warga dan fasilitator PNPM M-Pd.

3. Kelompok Masyarakat

Untuk mendukung keberhasilan program ini, kelompok masyarakat hendaknya melakukan kegiatan yang dapat membantu terwujudnya tujuan PNPM M-Pd, alokasi

dana yang diberikan harus digunakan untuk sumbangsih terhadap perkembangan pengembangan usaha yang dapat ekonomi masyarakat. menciptakan kemandirian ekonomi, bukan untuk hal lain diluar itu yang tidak memiliki

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2013. *Evaluasi PNPM Mandiri*. Jakarta : Bappenas

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika

Kusumanegara,Solahuddin .2010.*Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Suharto, Edi.2014.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama

<http://pohgadingpati.blogspot.co.id/> diakses pada 3 oktober 2015: 21.08 WIB

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>